



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYERAHAN LHP BPK ATAS LKPD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
RABU, 17 JUNI 2026**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. SDR.GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. ANGGOTA V BPK RI Dr. BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, AK,
M.B.A, CA.CFE, SCFA, CFrA
YTH. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA (RADEN YUDI RAMDAN BUDIMAN, SE, MM,
Ak, CA, CFrA, CSFA, CPA)
YTH. KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI SUMATERA BARAT (
SUDARMINTO EKO PUTRA, SE, MM. CSFA,CFrA, ERMAP)
BESERTA JAJARANNYA
YTH. FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
TYH. SDR. KEPALA KANWIL DIRJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA**

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur x kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Shalawat beriring salam, kita sampaikan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan dan panutan bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin YRA.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Forkopimda, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat serta Bpk/Ibu, Undangan yang telah berkenan hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Rabu, 17 Juni 2026, dengan Agenda Penyerahan Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Kepala Perwakilan BPK yang kami Hormati;

Penyerahan LHP BPK atas pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD dan Pemerintah Daerah, merupakan agenda konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel khususnya dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai agenda konstitusional, LHP BPK memiliki fungsi sebagai sarana untuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, pedoman koreksi dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah dan OPD serta bukti kepatuhan dan opini Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah, orientasi dari penyerahan LHP BPK atas pemeriksaan keuangan daerah, tidak lagi sekedar

untuk mendapatkan opini “ WTP “, tetapi esensi utamanya adalah bagaimana LHP BPK dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan APBD yang berkualitas, efektif, efisien serta memberikan multi player effect yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hampir semua institusi baik dilingkup Pemerintah maupun lingkup Pemerintah Daerah, opini atas hasil pemeriksaan keuanganya adalah “ WTP “. Bahkan kita di Sumatera Barat, opini WTP ini sudah berhasil di capai sebanyak 13 kali berturut-turut.

Meskipun capaian opini WTP ini telah sering di capai, tetap saja ada temuan dan bahkan temuan tersebut merupakan temuan berulang. Opini WTP tersebut, belum dijadikan sarana untuk perbaikan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah. semestinya, daerah yang sudah mendapat opini WTP secara berulang dan terus menerus, idealnya, tidak ada lagi temuan dari hasil pemeriksaan tahun berikutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait, menggunakan LHP BPK yang diserahkan oleh BPK,

sebagai sarana untuk perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik, lebih profesional, lebih efektif dan efisien serta memberikan dampak yang sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini, tidak lagi permasalahan administratif terkait dengan ketersediaan informasi, kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, perencanaan dan pengawasan. Tetapi permasalahan utama saat ini adalah rendahnya kinerja Pemerintah Daerah dalam peningkatan PAD, lambatnya penyerapan anggaran, pemborosan, anggaran yang tidak tepat sasaran serta rentan terhadap tindakan korupsi.

Oleh sebab itu, ke depan dalam LHP BPK juga dapat mengungkap serta memberikan saran kepada Pemerintah Daerah terkait dengan upaya yang harus dilakukan, agar dapat meningkatkan PAD, mempercepat dan meningkatkan penyerapan anggaran, meningkatkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta menutup semua celah terjadi pemborosan dan penyalahgunaan keuangan daerah.

Bagi kita di Provinsi Sumatera Barat dengan kapasitas yang terbatas dan besarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan daerah terutama penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi diakhir tahun 2025 yang lalu, maka kualitas dalam pengelolaan APBD sangat menentukan sekali keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu, marilah kita jadikan LHP BPK atas LPKD Tahun 2025 ini, sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja APBD secara menyeluruh, ketepatan sasaran program dan kegiatan serta akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaannya.

Bpk/Ibu Undangan dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Pemeriksaan APBD yang dilakukan oleh BPK merupakan wujud dukungan BPK terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Oleh sebab itu, DPRD akan terus memberikan dukungan kepada BPK dalam melakukan pemeriksaan atas LPKD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan APBD yang kredibel, berkualitas dan digunakan

sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, kami memberikan apresiasi kepada Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, yang telah melaksanakan tugasnya secara profesional untuk memastikan pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, kita tentu berharap akan mendapatkan informasi, catatan dan rekomendasi yang benar untuk perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja serta dapat menjadikan APBD Provinsi Sumatera Barat semakin berkualitas.

Sdr. Gubernur dan Kepala BPK Perwakilan Sumbar dan Undangan Yang kami Hormati;

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Untuk itu, kami menyerahkan kepada protokoler untuk dapat memandu prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

.....

Prosesi Penyerahan LHP BPK Atas LKPD TA.2025

- 1. Sambutan Kepala BPK Perwakilan Sumbar
- 2. Penyerahan LHP Secara Simbolis
- 3. Sambutan Gubernur Sumatera Barat
- 4. Pembacaan Doa

.....

Sdr. Gubernur dan Kepala BPK Perwakilan Sumbar dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Kita sama-sama telah menyaksikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Alhamdulillah, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 kembali mendapatkan opini WTP “ Wajar Tanpa Pengecualian “. Ini merupakan capaian opini WTP yang ke 14 secara berturut-turut yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus merupakan pengukuhan serta pengakuan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Capaian opini WTP tersebut, tentu merupakan hasil kolaborasi semua pihak dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD serta dukungan dan supervisi yang dilakukan oleh Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat dan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, kami atas nama DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan mitra strategis, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur beserta jajarannya atas capaian opini WTP tersebut dan menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan supervisi

kepada Pemerintah Daerah dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Namun demikian, sebagaimana yang kami kemukakan sebelumnya, bahwa tujuan akhir dari laporan pemeriksaan keuangan daerah ini, tidak hanya sebatas untuk mendapatkan opini WTP, tetapi adalah untuk memastikan bahwa keuangan daerah telah digunakan sesuai dengan yang direncanakan, efektif dan efisien untuk mewujudkan target yang ditetapkan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkup fungsi pengawasan DPRD.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan “
Alhamdulillahirabbilamin “ Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.

Billahitaufiqwalhidayah

Wss.wr.wb.